

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di Bab IV maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi keuangan daerah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan meski mengalami penurunan di tahun 2016. Di tahun 2013 dengan nilai 6%, di tahun 2014 dengan nilai 7%, di tahun 2015 yaitu dengan nilai 9%, di tahun 2016 turun menjadi 7% dan di tahun 2017 mengalami peningkatan dengan nilai 9%. Dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari tahun 2013-2017 tergolong sangat rendah karena berada diantara 0,00%-10,00%. Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menjalankan desentralisasi karena berdasarkan analisis rasio keuangan di atas pendapatan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Muara Enim tergolong rendah.
2. Analisis rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat/provinsi. Dilihat dari analisis rasio efektivitas PAD dari tahun 2013-2017. Di tahun 2013 dengan nilai 90%, di tahun 2014 dengan nilai 89%, di tahun 2015 dengan nilai 86%, di tahun 2016 dengan nilai 83% dan di tahun 2017 dengan nilai 77%. Dapat diketahui bahwa Ketergantungan keuangan daerah selalu mengalami peneurunan dari tahun 2013-2017 meskipun selalu mengalami penurunan tingkat ketergantungan keuangan masih cukup tinggi karena masih >50,00%, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum efektif dalam merealisasikan PAD sehingga pajak daerah dan BUMD belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal.
3. Analisis rasio keuangan di atas pendapatan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Muara Enim tergolong rendah sekali dan berpola instruktif. Dilihat dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2017.

Ditahun 2013 dengan nilai 7%, di tahun 2014 dengan nilai 8%, ditahun 2015 dengan nilai 10%, di tahun 2016 dengan nilai 8% dan Di tahun 2017 dengan nilai 12%. Dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan di tahun 2013-2015, di tahun 2016 mengalami penurunan dan ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan, meskipun selalu mengalami peningkatan dan penurunan namun kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali karena berada dibawah 0,25%, yang berarti peranan pemerintah lebih dominan dari pada kemandirian pemerinrah daerah atau dengan kata lain masih bergantung pada pihak eksternal.

4. Analisis rasio keuangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Muara Enim dari tahun 2013-2017 sudah cukup efektif. Ditahun 2013 dengan nilai 107%, ditahun 2014 dengan nilai 100%, ditahun 2015 dengan nilai 97%, ditahun 2016 dengan nilai 91% dan ditahun 2017 dengan nilai 80%. Meskipun dari tahun 2013-2017 selalu mengalami penurunan rasio efektivitas namun demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013-2017 telah cukup efektif dalam mengelola PADnya, karena berada diantara 90%-99%
5. Analisis rasio efisiensi PAD Kabupaten Muara Enim dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Ditahun 2013 dengan nilai 107%, ditahun 2014 dengan nilai 99%, di tahun 2015 dengan nilai 106%, ditahun 2016 dengan nilai 90% dan ditahun 2017 dengan nilai 78%. Dapat dilihat bahwa efisiensi keuangan daerah sudah efisien karena berada diantara <100%. Meskipun rata-rata efisiensinya sudah efisien, namun biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih besar. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaetn Muara Enim dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

5.2. Saran

1. Diharapkan pemerintah kabupaten Muara Enim dapat meningkatkan efektivitas PAD melalui peningkatan PAD maka pemerintah kabupaten Muara Enim dapat menjalankan desentralisainya.
2. Diharapkan pemerintah kabupaten Muara Enim dapat meningkatkan PADnya sehingga dengan adanya peningkatan PAD ini maka pemerintah kabupaten Muara Enim dapat lebih mandiri.
3. Diharapkan kemandirian keuangan, peningkatan PAD harus dapat dioptimalkan dengan cara menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi, serta pendirian BUMD sector potensial. Agar PAD dapat menjadi kontribusi dalam sumber pendapatan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada sumber pendapatan non PAD.
4. Diharapkan dalam hal efektifitas, sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Muara Enim, mengurangi belanja rutin dan pembangunan untuk sarana dan prasarana masyarakat sehingga anggaran belanjanya tidak hanya dihabiskan oleh kebutuhan rutin.
5. Diharapkan dalam hal efisiensi, pemerintah daerah kabupaten Muara Enim dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan menyesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.